

# Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Malang

## Laporan



**Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN)  
Malang Development Watch (MADEWA)  
International NGO for Indonesian Development (INFID)**

**Maret - Mei 2017**

## **Pengantar:**

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/TPB) membutuhkan inovasi dan kolaborasi menyeluruh tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pencapaian TBP. Tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional lama dimana pemerintah daerah selalu menunggu sosialisasi dan intruksi dari pusat, sebagaimana pelaksanaan MDGs sebelumnya yang terbukti ketinggalan, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif menyusun strategi yang tepat bagi pembangunan di daerahnya.

Namun disadari bahwa di tingkat daerah juga terjadi ketimpangan pemahaman dan pada gilirannya komitmen antara piha-pihak yang terkait. Kalangan masyarakat sipil memiliki pengetahuan dan informasi yang relative lebih memadai dari institusi dan aparat pemerintah. Kesenjangan informasi bisa disebabkan pemerintah daerah masih terjebak pada pola struktural dan 'menunggu dari pusat' atau struktur di atasnya seperti pemerintah propinsi. Pemerintah daerah 'selalu' bergerak dengan pedoman-pedoman dalam perencanaan dan implementasi termasuk penganggaran yang seringkali malah menjadikannya kurang keberanian dalam berinovasi.

Di sisi lain, keterlibatan kelompok masyarakat sipil yang luas dalam TPB juga membutuhkan strategi dan kapasitas yang kuat. Kelompok masyarakat sipil di kabupaten Malang belum sepenuhnya memberikan perhatian pada TPB, termasuk membantu pemerintah dalam menyusun konvergensi dengan RPJMD dan mengidentifikasi kerja-kerja kolaboratif. Semestinya kelompok masyarakat sipil bisa membantu dengan menawarkan data-data mikro berdasarkan temuan lapangan hasil kerja-kerja mereka. Data-data mikro bisa menjadi acuan dalam penyusunan prioritas daerah dan menghasilkan indikator-indikator terukur yang relevan serta selaras dengan visi pembangunan pemerintah daerah.

Kabupaten Malang berkerjasama dengan Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) dan Malang Development Watch (MADEWA) menyusun serangkaian kegiatan untuk menyusun rencana aksi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka pelaksanaan TBP. Inisiasi awal kegiatan ini didukung oleh International NGO for Indonesian Development (INFID) Jakarta. Harapannya, kabupaten Malang bisa mengambil langkah lanjutan pasca fasilitasi awal ini, sehingga rencana pembangunan bisa selaras dengan TPB. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Lokakarya Pemetaan Komitmen dan Prioritas
2. Diskusi Terfokus Penyusunan Rencana Tindak
3. Pertemuan Koordinatif Kerja Kolaboratif Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil

Laporan ini menyajikan pokok-pokok bahasan dari tiap kegiatan di atas yang dimaksudkan sebagai kesatuan kegiatan dengan tujuan menyusun rencana aksi kolaborasi pemerintah kabupaten Malang dengan kelompok masyarakat sipil. Dalam laporan ini terminology dan akronim SDGs di-Indonesiakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB.

## I. Lokakarya Pemetaan Komitmen dan Prioritas

Lokakarya yang bertujuan memetakan prioritas program pemerintah kabupaten Malang dan posisi masyarakat sipil dalam membangun kolaborasi pelaksanaan TPB. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 dan dihadiri oleh: 90 peserta dari Bappeda, dinas teknis pemerintah kabupaten Malang, masyarakat sipil, termasuk komunitas penyandang disabilitas dan akademisi.

### Beberapa poin kunci dari Lokakarya:

1. TPB membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih kuat dari MDGs, termasuk inisiatif dan inovasi kebijakan pemerintah daerah. TPB bersifat inklusif dan mensyaratkan kerja kolaboratif pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan pelaku usaha. Pelaksanaan TPB sesuai dengan prioritas lokal, dengan cerdas membaca dan menggunakan data daerah dan menganalisis secara makro dan mikro
2. Desentralisasi bisa menjadi potensi termasuk membesarnya kewenangan desa untuk mandiri dibarengi dengan semakin besarnya sumberdaya yang bisa dikelola, perlu didorong untuk menyusun program selaras TPB dengan indikator terukur
3. Dibanding dengan kabupaten setipe di Jawa Timur, kabupaten Malang masih relative tertinggal dalam hal IPM karena pembangunannya tidak difokuskan pada peningkatan daya ungkit masyarakat untuk peningkatan daya beli
4. Kabupaten Malang masih menghadapi persoalan koordinatif dan penyelarasan program terkait TPB, termasuk dengan legislative
5. Pemerintah kabupaten Malang masih melihat ketiadaan regulasi pusat sebagai kendala untuk berinovasi dalam pelaksanaan TPB

### 1. Nila Wardani - Ruang Mitra Perempuan: Dari MDGs ke TPB



Indonesia menjadi bagian global dalam pelaksanaan TPB yang akan berakhir tahun 2030. Dengan *tag-line* **No One Left Behind**, mengartikan bahwa semua pihak terlibat dan sekaligus menjadi sasaran, terutama kelompok yang selama ini terpinggir seperti kelompok disabilitas, kelompok perempuan, kelompok dengan orientasi seksual berbeda dan kelompok minoritas lainnya. Jika di dalam MDGs yang lalu tingkat konsentrasi dan tanggungjawab ada di pemerintah, maka

TPB harus dilakukan kolaboratif oleh semua pihak: pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi. TPB memiliki konvergensi yang sangat kuat dengan NAWACITA ataupun RPJMN, sehingga pemerintah daerah tidak perlu ragu mengenai payung hukum. Inovasi pemerintah daerah lewat RPJMD dan rencana tahunan bisa diselaraskan untuk mencapai TPB.

## 2. Meila - INFID: TPB - Kebijakan, Peluang dan Tantangan di Tingkat Nasional

TPB memiliki 17 tujuan dengan 169 target dan 230 indikator. Indikator di tingkat UN masih di proses kemudian dibawa ke Negara-negara yang menyepakati TPB, sehingga ada indicator global dan indikator nasional yang disesuaikan dengan kondisi Negara masing-masing. Ada tujuan-tujuan TPB yang indikatornya belum dirumuskan sehingga masih memungkinkan untuk bertambah. Terdapat 5 elemen dalam TPB yang dikenal dengan 5P yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*. TPB merupakan kelanjutan dari MDGs. MDGs disepakati tahun



2000-2015, tetapi Indonesia baru mulai melaksanakan pada tahun 2010, artinya mengalami keterlambatan 10 tahun. Sehingga dibutuhkan upaya agar TPB tidak mengalami hal yang sama. Sejak disepakati tahun 2015 kita berupaya agar tidak tertinggal dengan Negara lain. Presiden Jokowi telah mendeklarasikan NAWACITA sebagai prioritas pembangunannya dan tertuang dalam RPJMN. TPB digunakan sebagai alat untuk melakukan percepatan pencapaian prioritas pembangunannya. Pencapaian koefisien gini (untuk mengukur ketimpangan) secara nasional sudah berkurang 0,02 belum menggunakan TPB, tetapi jika menggunakan TPB maka besar kemungkinan untuk pencapaiannya bisa 2 kali lipat. Pelipat gandaan target berarti juga pelipatgandaan upaya untuk mencapai goals. Pencapaian selama kurun pelaksanaan TPB adalah:

- (i) adanya draft final perpres tentang pelaksanaan TPB sejak September 2016. Tertuang pula pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluator TPB,
- (ii) akan terbentuk tim koordinasi pelaksanaan TPB,
- (iii) pemahaman tentang TPB pada masyarakat sipil semakin menguat karena di tahun 2015 yang masih bernama pembangunan post 2015, INFID telah melakukan diseminasi kepada CSO di seluruh Indonesia. Yang baru saja dilakukan oleh INFID adalah melakukan pelatihan tentang TPB dengan peserta dari CSO dan pemerintah daerah yang harapannya ada kerja kolaboratif antar ke 2 unsur,
- (iv) komitmen dari beberapa pemerintah daerah dan universitas. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah mendeklarasikan secara tertulis komitmennya untuk melaksanakan TPB seperti Pangkep Sulsel, Jawa Tengah, ada PERBUB TPB di Bojonegoro.

Tantangan: secara politik TPB harus menjadi solusi atas persoalan-persoalan di daerah dan bermanfaat bagi pemerintahannya bukan hanya pemerintah, perlu peningkatan pemahaman TPB warga, menjadikan TPB sebagai isu mainstream, CSO perlu mendukung pemerintah daerah agar lebih kuat motivasinya, memastikan semua terlibat termasuk kaum difabel serta pelibatan pihak swasta.

### 3. *M. Imron Rosyadi (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Malang): Arah & Prioritas Pembangunan Pasca MDGs*



- Dalam pelaksanaan MDGs kabupaten Malang telah mencapai beberapa hal, meskipun beberapa hal lain belum tercapai, seperti penurunan angka terpapar HIV, penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran serta penurunan angka kematian ibu melahirkan
- Pemerintah kabupaten Malang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif yang searah dengan prinsip-prinsip TPB, serta pendekatan yang layak anak,

*pro poor, pro job dan pro growth.*

- Pelaksanaan TPB perlu lompatan-lompatan inovasi agar tercapai di tahun 2030, jika dilakukan secara regular akan sangat sulit tercapai. Contoh gol penghapusan kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan kabupaten Malang mencapai 11,07%. Tahun 2020 ditargetkan turun menjadi 8%. Sehingga jika 2030 targetnya 0% kemiskinan maka sangat perlu dilakukan lompatan-lompatan inovasi. Langkah-langkah lain termasuk (i) mematangkan regulasi setidaknya ada SK bupati terkait sekretariat bersama, (ii) kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta dan organisasi kemasyarakatan, (iii) menggali inovasi, termasuk yang selama ini telah dilaksanakan seperti program bantuan untuk siswa miskin, BOSDAKIN, JAMKESDA. Program Sutra emas (surveillance epidemiology terpadu berbasis masyarakat) di kesehatan merupakan inovasi yang diakui secara nasional.
- Perlu membangun komitmen pelaksanaan TPB dan melakukan sinkronisasi RPJMD 2016-2021. Ini menjadi tugas berat karena adanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Konsekuensinya adalah RENSTRA dan program SKPD akan berubah.
- Isu-isu strategis pemerintah kabupaten Malang yang selaras dengan TPB adalah:
  1. Pemerataan sarana-prasarana dan kesetaraan kualitas pendidikan
  2. Peningkatan kualitas kesehatan dasar

3. Pengembangan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum meliputi; Kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, pemukiman dan prasarana, lingkungan
  4. Pengurangan angka kemiskinan dan tingginya angka pengangguran
  5. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas
  6. Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik
  7. Pengarusutamaan jender dalam pembangunan
- Fokus pembangunan kabupaten Malang adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan pariwisata dan menjaga lingkungan hidup. Urusan pembangunan terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur harus mencerminkan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar Rp. 3,5 T (sekitar 64% (untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan hanya 36% untuk program-program pembangunan) dengan luasan wilayah yang terdiri dari 378 Desa, 12 Kelurahan membutuhkan penyusunan prioritas.

4. ***Wawan Sobari, Ph.D - FISIP Universitas Brawijaya: Perspektif Kewirausahaan Sosial-Politik Desa untuk Pencapaian TPB***

- Data adalah *public needs* apalagi BPS sejak tahun 2015 data grafis sudah bisa diakses dengan mudah dan bagi masyarakat sangat penting karena bisa melihat kondisi daerahnya dan mengkritisi strategi pembangunannya.
- FISIP Universitas Brawijaya sedang mengembangkan paradigma baru tentang kewirausahaan sosial politik. Sejak Januari 2017 mendeklarasikan pemberian penghargaan bagi desa-desa di seluruh Indonesia terkait praktek-praktek kewirausahaan sosial politik guna mendorong kemajuan desa.
- Dengan menggunakan data yang ada dan analisis makro, komparasi dengan kabupaten setipe (Sidoarjo, Banyuwangi, Jember) di Jawa Timur, beban dan kesempatan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pencapaian TPB:



Berikut beberapa beban tersebut:

- i. APBD Kab. Malang 2016 di dominasi untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan hanya 38,85% untuk belanja langsung, jika ingin mengejar target TPB maka hal ini menjadi beban bagi kabupaten Malang. Belanja per kapita penduduknya juga rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten yang setipe.

- ii. Sarana kesehatan di 4 kabupaten semuanya rendah di bawah rerata kabupaten, 1 puskesmas di kabupaten Malang untuk sekitar 65.238 orang. Meskipun ada pustu dan poskesdes tetap saja rasionya tinggi.
- iii. Sarana pendidikan di kabupaten Malang tertinggi dibanding kabupaten yang lain, tetapi dengan jumlah penduduk yang sekitar 2,5 juta masih dirasa kurang.
- iv. Pengangguran terbuka di kabupaten Malang memang tidak setinggi di Sidoarjo, tetapi ini bisa menjadi factor beban
- v. Gini rasio (indeks ketimpangan pendapatan antar warga) kabupaten Malang di tahun 2015 cukup tinggi yaitu 0,38. Sidoarjo meskipun daerah industri gini rasionya masih lebih tinggi dari kabupaten Malang. Meskipun semua kabupaten masih dibawah rerata Jawa timur
- vi. Presentase jumlah penduduk miskin di kabupaten Malang yang 11,07% meskipun masih dibawah rerata Jawa timur tetap harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk menjawab capaian TPB

Sementara peluangnya adalah:

- i. Pengeluaran penduduk kabupaten Malang mayoritas bertumpuk pada kisaran 300 ribu – 500 ribu per bulan. Di kabupaten Sidoarjo pengeluaran kisaran di atas 1 juta per bulan ada 26,05% penduduk. Artinya daya beli masyarakat di Sidoarjo lebih baik, Dengan IPM 77% di tahun 2015, artinya masyarakat Sidoarjo punya kesempatan memilih lebih baik. Tidak tertampung di puskesmas masih bisa membayar fasilitas kesehatan yang lain, pun juga dengan pilihan pendidikan memungkinkan untuk memilih yang lebih baik. Ini yang seringkali tidak dilihat oleh pemerintah kabupaten/kota bahwa factor pengeluaran ini cukup penting.
- ii. Surabaya dan Sidoarjo pengeluaran warganya berkumpul diatas 1 juta per bulan, sedangkan kota Blitar hanya 19,23%. Agak sedikit pesimis dengan kebijakan pemerintah kota Blitar dengan program bantuan gratis seragam dan lain sebagainya karena terbukti tidak dapat menaikkan IPM nya. Kebijakan yang baik adalah berupaya meningkatkan kemampuan daya beli melalui peningkatan pendapatan, bukan melalui subsidi-subsidi gratis. Sehingga memiliki kemampuan untuk memilih layanan kesehatan dan pendidikan.
- iii. Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan desa memiliki kewenangan yang sangat luar biasa, yang penting adalah bahwa desa bisa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dan ini adalah esensi dari otonomi. Design kebijakan/ pembangunan harus merefleksikan dari demand dan need dari masyarakatnya. Jadi strategi untuk pencapaian target TPB bisa dilakukan dengan focus ke desa.
- iv. Jika APBD kabupaten sangat terbatas yang hanya 38% dan itu tidak dapat memenuhi *demand* dan *needs* semua masyarakat, maka pembangunan bisa di mulai dari desa dengan menggunakan dana desanya. Dana desa yang sejak tahun 2015 naik terus setiap tahunnya. Di tahun 2017 setidaknya per desa di kabupaten Malang mendapat

sekitar 827 juta rupiah, belum termasuk alokasi dana desa dari kabupaten. Setidaknya per desa mengelola dana sekitar 1,2 M yang selama ini lebih banyak digunakan untuk yang tidak produktif, seyogyanya digunakan untuk ekonomi produktif yang memiliki daya ungkit.

#### Upaya Memanfaatkan Faktor Kesempatan

- i. Pengembangan kewirausahaan sosial politik desa yang intinya adalah pembaharuan di masyarakat yang berbeda dengan kewirausahaan ekonomi yang motif utamanya adalah profit. Boleh ada motif ekonomi dalam kewirausahaan sosial politik tetapi bukan untuk individu melainkan untuk seluruh warga desa seperti BUMDes, Kelompok tani dan kelompok perempuan.
- ii. Kewirausahaan sosial prinsipnya adalah setiap rupiah, setiap orientasi pembangunan itu digunakan untuk meningkatkan nilai sosial yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Misalnya kasus pemasangan, di PUSKESMAS Bantur sudah ada program untuk menangani masalah itu yang dikembangkan oleh kepala PUSKESMAS dan ini merupakan contoh cerdas. Di desa-desa lain paktek kewirausahaan sosial sangat mudah ditemui karena modal sosial atau nilai-nilai kemasyarakatan seperti gotong royong sudah ada, tinggal bagaimana mengarahkan dana desa digunakan untuk menciptakan kewirausahaan sosial.
- iii. Kewirausahaan komunitas ada banyak sekali seperti lumbung desa, kelompok tani. Saya menemukan APBDes inklusif di Trenggalek, yang digunakan untuk lansia, guru mengaji dan anak-anak muda yang suka olah raga untuk mencegah dari problem sosial. Di Prigi, daerah wisatanya dikelola untuk BUMDes.

Kewirausahaan politik → mendorong tata kelola pemerintahan desa menciptakan *public value* (kemanfaatan publik) dalam pengelolaan sumber daya, dalam pengambilan kebijakan yang partisipatif yang meng-inklusi anak, perempuan, kaum difabel dan kaum rentan lainnya yang juga harus tertuang dalam kebijakan anggaran. Serta kemanfaatan dalam layanan publik. Kunci dari kewirausahaan adalah sensitifitas terhadap masalah dan mau berinovasi. (Bisa link ke: *The Indonesian Democracy....www.thejakartapost.com*:

<https://www.google.com/amp/www.thejakartapost.com/amp/news/2016/09/05/political-entrepreneurship-and-democracy.html>)

#### 5. Wazir Witjaksono (KAEP/MADEWA): Peran dan Posisi CSO dalam Mengawal TPB

- CSO sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat diluar focus perhatian pemerintah
- Peran CSO dalam proses pembangunan sebagai mitra pemerintah dalam:





Penyelenggaraan berbagai kegiatan inovatif yang bila berhasil dapat direplikasi oleh berbagai pihak dan organisasi lain melalui program yang lebih luas; pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi berbagai program pembangunan; penyelenggaraan berbagai forum dialog tentang kebijakan serta berfungsi sebagai katalis bagi berbagai aktor pembangunan.

- Gagasan ke Depan: Keterlibatan masyarakat sipil yang diwakili oleh CSO bisa juga diterjemahkan dalam bentuk atau model Sekterariat Bersama atau SEKBER yang memiliki dasar hukum. Bersama pemerintah, CSO bisa terlibat dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan TPB termasuk menyusun indikator terukur yang bisa dipertanggungjawabkan.
- Keterlibatan CSO juga memastikan pelaksanaan pemerintahan yang inklusif dalam pelaksanaan TPB dan sebagai mitra kritis melakukan pemantauan dalam pengukuran capaian indikatornya, termasuk mendeka isu-isu yang tidak pernah dipikirkan seperti hak asasi manusia, kelompok marjinal dan kelompok minoritas.

### Dari Sesi Dialog

Setiyono - Forum Malang Kota Sehat

- Forum kabupaten sehat punya SKB no. 34 tahun 200. Ini juga bisa menjadi dasara bertindak untuk TPB daripada menunggu PERPRES yang belum diberlakukan. Bappeda menjadi kunci.
- Ketimpangan Malang kota dan kabupaten, karena 30% anggaran pendidikan kota diserap anak-anak kabupaten di daerah perbatasan terutama di jenjang SMP.



Reny - Organisasi Disabilitas

- perencanaan pembangunan fasilitas umum (gedung pemerintah, tempat ibadah, tempat wisata) belum sesuai dengan Permen PU no. 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis, fasilitas dan aksesibilitas untuk gedung dan lingkungan yang harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas buat semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Kelompok ini belum dilibatkan dalam perencanaan.
- Hasil pendataan terkait fasilitas umum yg ada di kab. Malang hanya gedung/kantor Bupati yang aksesible itupun masih perlu pembenahan seperti lebar pintu terutama pintu toilet yang seharusnya 90 cm agar yang berkusi roda bisa masuk.



Ina Irawati - WCC Dian Mutiara

- TPB bagus karena mengakomodir kebijakan responsive jender. Untuk menjawab kebijakan yang masih diskriminatif pemerintah perlu menyusun indikator.
- Perlu indikator di tingkat wilayah (kabupaten) agar lebih kontekstual seperti usia anak terkait kasus pernikahan dini, hak kesehatan reproduksi dan seksual



Dardiri Dardak - Mitra Wanita Pekerja Rumahan

- RPJMDes dijahitkan ke tukang bukan berdasarkan rumusan semuaarganya. Jadi RPJMDes hanya sebagai syarat administrasi agar dana cair.
- Saya mendorong RPJMDes yang partisipatif melalui training dengan model pilot project 1 desa per kecamatan dan terukur, atau melakukan audit public untuk mengukur suatu program dengan kacamata masyarakat



Indah Yuliana - UIN Malang

378 desa dan kelurahan di kabupaten Malang, perlu percepatan pelaksanaan TPB dengan kewirausahaan social politik, dan indikator lokal untuk mengukur pencapaiannya.

Budi - BPS Kabupaten Malang

TPB targetnya 100%. BPS menghasilkan indikator-indikator, di masa MDGs juga menghasilkan



indikator desa. Pengalaman MDGs untuk level Jawa Timur dari sekian target dan indikator mengalami penyempitan. Ada beberapa target dan indikator yang tidak ada di Jawa Timur dan Kab. Malang, karena ada beberapa indikator di MDGs yang di Kab. Malang tidak ada. Pun ada keyakinan TPB akan mengalami hal yang sama. Perencanaan pembangunan sudah terencana pun demikian dengan BPS, indikator di TPB bisa terindikasi. BPS saat ini sedang melakukan survey susenas, indikator TPB belum semua masuk dalam susenas. BPS bersepakat dengan Pemkab untuk memakai data di BPS dan jika tidak ada di BPS baru menggunakan data dari SKPD yang lain. Indikator nasional bisa terukur melalui survey BPS atau kementerian lembaga lain.

## II. FGD, 14 Maret 2017

Diskusi terfokus pertama dilakukan setelah lokakarya yang berperan sebagai pemantik pemahaman mengenai TPB. Diskusi ini diikuti oleh 30 peserta dari perwakilan pemerintah, lembaga masyarakat sipil dan akademisi. Diskusi terfokus memetakan beberapa hal utama terkait TPB.



### Masalah utama dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB

1. Regulasi:  
Ada kebutuhan bagi pemerintah daerah mengenai payung hukum karena PERPRES masih rancangan dan belum ada sosialisasi dari pemerintah pusat. Yang selama ini getol bersosialisasi hanya kalangan masyarakat sipil (LSM)
2. Sumberdaya manusia

- Ketimpangan pemahaman antara eksekutif dan legislative, termasuk antar OPD. Demikian halnya dengan kelompok masyarakat sipil dan akademisi
- Masyarakat umum masih awam mengenai TPB, hamper tidaka da media massa lokal yang memberi perhatian terkait isu tersebut.
- Tidak diketahui secara pasti tingkat pemahaman pebisnis mengenai peran tanggungjawab kolaboratifnya terhadap TPB
- Kemampuan mensinergikan TPB dengan RPJM daerah dan rencana strategis OPD, membaca indikator dan menciptakan indikator lokal sesuai prioritas

### 3. Komitmen dan koordinasi

- Pelibatan pihak pebisnis dan akademisi masih sangat terbatas, karena ketidak-jelasan siapa leading sektornya.
- Koordinasi antar kelembagaan dalam pemerintah masih lemah
- Belum memaksimalkan peran dna kerja kolaboratif antar pihak yang berkepentingan, termasuk menyatukan sumberdaya yang ada

### Potensi yang berhasil diidentifikasi:

#### 1. Kebijakan dan kewenangan

- Desentralisasi merupakan potensi daerah untuk berinovasi dari kewenangan yang ada. UU pembangunan desa memberikan peluang bagi desa untuk mandiri mengambil inisiatif kewenangan sekaligus dengan sumberdaya yang ada. Perlu didorong untuk implementasi pemerintahan yang baik: transparan, partisipatif dan akuntable dan inklusif.
- Pelaksanaan TPB bisa mengupayakan pemanfaatan seluas-luasnya sumberdaya alam kabupaten Malang yang belum tergarap

#### 2. Kelompok masyarakat sipil yang peduli dan bisa menjadi mitra kolaboratif yang kritis dengan membangun kesadaran dan komitmen kolektif.

### Hasil rumusan kegiatan yang teridentifikasi:

1. Forum koordinasi untuk menentukan prioritas pelaksanaan capaian TPB dengan pelibatan semua pihak (Pemda, CSO, Pihak pebisnis swasta)
2. Penyusunan indikator secara spesifik sesuai konteks kabupaten Malang
3. Komitmen pemerintah daerah untuk membentuk satuan kerja
4. Peningkatan kapasitas

### Kesepakatan jangka pendek:

- Membuat forum komunikasi & koordinasi pencapaian TPB
- Agenda Rencana Kerja kegiatan OPD untuk sinkronisasi dgn TPB
- RUMPUN membantu membuat matriks 169 target yang akan di share ke OPD, sehingga OPD dapat menyandingkan rencana kegiatannya.
- Bappeda akan memfasilitasi proses koordinasi berikutnya

### III. Pertemuan Koordinatif



Bappeda kabupaten Malang memfasilitasi dua kali pertemuan koordinatif antara organisasi pemerintah daerah (OPD) dan perwakilan masyarakat sipil. Kegiatan ini telah memetakan RPJM kabupaten Malang dan konvergensinya dengan 17 TPB dan 169 target. Selain itu juga dengan format yang sama mendiskusikan rencana kegiatan SKPD tahun 2018. Pertemuan juga dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang.

Pada pertemuan Koordinasi pertama, beberapa hal kunci yang dihasilkan dari dua kali pertemuan koordinatif yang dipimpin oleh Bappeda:

1. Pencapaian TPB untuk kabupaten Malang ditekankan pada penurunan angka kemiskinan dari 11% menjadi 8% di tahun 2021. Penurunan kemiskinan (Goal 1) menjadi tujuan semua komponen dinas teknis dan organisasi pemerintah daerah. Dibutuhkan data dasar (BPS) agar bisa terukur.
2. Kelompok masyarakat sipil mengawal dan mendampingi pelaksanaan TPB. Dengan pengalaman pendampingan di tingkat lapangan, kelompok masyarakat sipil bisa menghasilkan data dan fakta mikro sebagai penyanding data makro.
3. Beberapa program inovasi yang sudah dilakukan di tingkat dinas teknis akan diperkuat sebagai satu bagian pelaksanaan dan pencapaian TPB tingkat sektor. Misalnya sektor kesehatan dengan program Puskesmas ramah anak, peningkatan layanan untuk kesehatan reproduksi dan HIV AIDS. Forum sektor kesehatan untuk TPB akan

dibangun bersinergi dengan kelompok masyarakat sipil. Beberapa sektor lain juga bisa menyusun rencana inovatif.

4. Pemerintah kabupaten Malang berkeinginan menyosialisasikan SDGs atau TPB hingga ke tingkat desa, sehingga dengan peran posisi desa saat ini yang semakin strategis, perencanaan pembangunan yang mereka lakukan selaras dengan tujuan dan target pada SDGs. Peran masyarakat sipil sangat esensial dalam hal ini.
5. DPRPD terutama Komisi B perlu melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi eksekutif dalam mencapai TPB. Dibutuhkan pengelolaan pembangunan yang lebih komprehensif, terutama sinergitas anggaran yang tidak hanya penekatan sektoral.
6. Komitmen pemda dalam pelaksanaan TPB dan kemauan membuka jalan kerja kolaboratif dengan masyarakat sipil perlu dituangkan dalam suatu instrument legal formal, baik berupa SK Bupati atau semacamnya. Serta penyepakatan tim penyusun draft dari pemerintah dan representasi LSM.
7. Beberapa daftar program inovasi di kabupaten Malang perlu dikerangkakan selaras dengan target TPB. LSM bisa membantu dalam menyusun narasi serta mendesemiansikan lebih luas pada jaringannya. Ini perlu karena desemiansi capaian tidak hanya lewat dan kepada jalur pemerintah, namun perlu diperluas guna mendapatkan apresiasi sekaligus dukungan.
8. Adanya temuan MADEWA mengenai isu pendidikan dasar antara daya tampung kota Malang dan pilihan sekolah bagi calon siswa kabupaten Malang terutama di daerah pinggiran/perbatasan dengan kota Malang telah berpotensi konflik. MADEWA akan menginisiasi hearing dengan KOMisi E DPRD kabupaten Malang untuk membicarakan hal ini.

Sementara dari hasil pertemuan koordinasi kedua, beberapa poin kunci yang bisa dicatat dan disepakati antara lain:

1. Dalam pemetaan RPJMD terlihat konvergensinya dengan goals dalam TPB, sehingga sudah bisa menjadi landasan hukum.
2. Pemetaan RPJMD 2016-2021 kabupaten Malang yang diterjemahkan dalam renja SKPD telah dipetakan sesuai target TPB. Namun ke depan pembahasan dan arah kerja bisa mengambil prioritas. Sejalan dengan misi pemerintah kabupaten dalam penurunan kemiskinan hingga 8% di tahun 2021, maka prioritas pada sector yang sangat terkait langsung dengan isu kemiskinan dan memiliki daya ungkit yang besar dalam membuka peluang kemandirian ekonomi masyarakat, yakni; sektor perdagangan dan industri, pendidikan, kesehatan dan koperasi dan usaha kecil
3. Sosialisasi draft instrument formal untuk TPB bisa berupa SK Bupati atau PERBUB. Masih dibutuhkan judul yang paling sesuai instrumen ini, karena ini menyangkut arah pelaksanaan ke depan. Perlu penajaman peran masyarakat sipil yang lebih strategis, dan tidak hanya sebagai peran pendampingan di lapangan.

4. Draft ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten. Konsekuensi pendanaan juga telah dipikirkan lewat anggaran daerah dengan menggunakan mekanisme yang ada. Bila telah ditetapkan, konsekuensi anggaran bisa dimulai tahun 2018.
5. Pemerintah daerah masih merasa perlu menggandeng keterlibatan pihak swasta/usaha yang lebih besar. Meskipun selama ini keterlibatan mereka lewat CSR telah berlangsung, namun terbatas pada wilayah ring satu sekitar area industry. Dibutuhkan rencana komprehensif keterlibatan yang lebih luas untuk dampak yang lebih nyata karena pencapaian TPB menjadi agenda bersama, termasuk kalangan usaha dan filantropi

#### Tindak Lanjut dan Kesepakatan Umum



- LSM akan terlibat dalam sosialisasi TPB di tingkat lebih bawah, kecamatan dan desa, serta dipastikan terlibat dalam Musrenbang dengan undangan formal dari pemerintah.
- Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan selaras TPB akan dituangkan dalam bentuk SK Bupati atau PERBUB dengan konsekuensi anggaran, yang diharapkan bisa masuk anggaran tahun 2018
- LSM memprkuat pemerintah tidak hanya dalam pelaksanaan TPB namun juga menggali capaian dan menuangkan dalam laporan serta mendeseminasikan secara lebih meluas sesuai jaringan yang dimiliki. Catatan LSM diakui sebagai bagian dari laporan pemerintah dalam TPB.

- Pemerintah kabupaten Malang menetapkan prioritas pengurangan kemiskinan dan semua sektor terkait dengan isu ini. Kegiatan dan rencana inovatif perlu ditonjolkan.
- Perlu data akurat dalam menyusun indikator untuk pelaksanaan dan pengukuran TPB.